Jurnal Tata Sejuta Vol.7 No.1 Maret 2021



Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM

http://ejurnalstiamataram.ac.id P-ISSN 2442-9023, E-ISSN 2615-0670

KAPABILITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Haeril¹, Nur Anilawati², Suraya³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

Info Artikel

Sejarah Artikel: Diterima 27 Oktober 2020 Disetujui 02 Maret 2021 Dipublikasikan 19 Maret 2021

Kata Kunci:
Kapabilitas,
Kelembagaan,
Penanggulangan
Bencana,
Pemerintah
Daerah,
Kabupaten Bima.

Abstrak

Kapabilitas kelembagaan menjadi sebuah tolak ukur pemahaman dan kemampuan yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan kapabilitas kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan Bencana belum menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya keuangan yang masih minim dimana pagu anggaran dalam penanggulangan bencana daerah belum memenuhi angka 1 persen, padahal menurut Undang-Undang mewajibkan minimal 1 persen dari APBD, sehingga menyebabkan keterpaduan dan koordinasi kelembagaan tidak efektif, demikian upaya kolektif untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana juga tidak maksimal. Selain itu rendahnya Indeks ketahanan bencana Kabupaten Bima dimana masih berada pada level 3 berdasarkan indikator Hyogo Frameworks for Actions (HFA). Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bima telah melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana, namun dengan pencapaianpencapaian yang masih bersifat sporadis karena disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis serta lemahnya daya dukung anggaran. Selain itu, data tingkat kesiapsiagaan dan kapasitas Daerah Kabupaten Bima dalam menghadapi berbagai jenis bencana berada pada level rendah dan sangat berisiko. Untuk itu, menjadi sangat penting pelibatan seluruh SKPD untuk pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam setiap kebijakan di daerah. Juga pelibatan peneliti, NGO, dunia usaha, serta peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagai upaya merubah paradigma penanggulangan bencana di Kabupaten Bima. Selain itu perlunya penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana.

REGIONAL GOVERNMENT INSTITUTIONAL CAPABILITIES OF BIMA REGENCY IN DISASTER MANAGEMENT

Keywords:

Abstract

Capability, Institutional, Disaster Management, Local Government, Bima Regency.

Institutional capability becomes a measure of understanding and ability of local governments in disaster management efforts. This study aims to analyze and describe the institutional capabilities of the Bima District Government in disaster management. This study used descriptive qualitative method. The results show that Disaster management policies have not become a priority for Regional Government policies, financial resources are still minimal where the budget ceiling in regional disaster management has not met the 1 percent figure, even though according to law it requires at least 1 percent of the APBD, causing integration and coordination ineffective institutions, thus collective efforts to achieve disaster management objectives are also not maximal. In addition, the low disaster resilience index in Kabupaten Bima is still at level 3 based on the Hyogo Frameworks for Actions (HFA) indicator. This explains that the Bima District Government has implemented efforts to reduce disaster risk, but with achievements that are still sporadic in nature due to the absence of institutional commitment and / or systematic policies and weak budgetary support. In addition, data on the level of preparedness and capacity of Kabupaten Bima in the face of various types of disasters is at a low level and is very risky. For this reason, it is very important to involve all SKPDs in mainstreaming Disaster management in every regional policy. Also involving researchers, NGOs, the privat sector, as well as capacity building and community participation as an effort to change the paradigm of disaster management in Bima Regency. In addition, it is necessary to implement a strong disaster management mechanism with a disaster risk reduction perspective.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

PENDAHULUAN

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penaggulangan bencana, bahwa serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi merupakan satu kesatuan dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana beserta tindakan-tindakan antisipasinya merupakan syarat mutlak untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana alam. Perlu *political will* Pemerintah untuk dapat memprioritaskan program manajemen bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap

[™]Alamat korespondensi:

¹Haeril@stisipbima.ac.id.

²nuranilawati741994@gmail.com

³Suraya222@gmail.com

darurat, dan pasca bencana, serta kegiatan sosialisasinya kepada masyarakat (Handayani, 2011).

Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana mengacu pada kemampuan lembaga Pemerintah untuk membuat kebijakan dan melaksanakannya secara efektif. Karena ketika organisasi terkait tidak sepenuhnya berkomitmen untuk merespon ancaman bencana, ini dapat menyebabkan masyarakat benar-benar tidak siap menghadapi bencana (Paul, 2011). Kondisi tersebut akan berdampak secara politik bagi Pemerintah, dimana responsivitas lembaga otoritas terhadap bencana yang lamban dapat menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat yang terdampak bencana, dengan beranggapan bahwa Pemerintah tidak menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan kepada warganya (Ulum, 2014).

Namun, penanggulangan bencana selama ini hanya bertumpu pada masalah saat bencana dan beberapa penyebabnya. Sedangkan kegiatan antisipasi dan upaya memperkirakan konsekuensi potensial bahaya tertentu belum maksimal dilakukan, kelembagaan yang tidak fleksibel dan kurang sigap, struktur sistem peringatan dini dan sosialisasi yang tidak efektif bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi kendala dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana (Faturahman, 2017).

Dalam laporan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2018, bahwa dampak yang ditimbulkan bencana telah menyebabkan 4.814 orang meninggal dunia dan hilang, sebanyak 10,293 Juta jiwa menderita dan mengungsi. Terdapat 320.165 unit rumah rusak, terdiri dari 150.513 rusak berat, sebaanyak 39.815 rusak sedang, dan sebanyak 129.837 rusak ringan, dengan kerugian yang mencapai 34 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Selain itu jutaan masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah rawan bencana dengan tingkat mitigasi bencana yang rendah (bnpb.go.id.)

Demikian di Kabupaten Bima. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan daerah pegunungan bertekstur dataran tinggi sehingga rawan longsor dan banjir bandang setiap tahunnya (Sopiawati, 2019). Menurut data Kompas dan republika tahun 2019, dari bulan januari sampai maret 2019 sebagian wilayah Kabupaten Bima diterjang banjir parah di Kecamatan Sanggar, Monta, Wera, Bolo, Palibelo, dan Sape.

Selain itu, bencana di Kabupaten Bima juga dominasi oleh gempa bumi, gelombang pasang, banjir rob dan abrasi, kebakaran hutan, kekeringan, cuaca ekstrem, gunung api, keracunan akibat intrusi air laut, epidemi, dan wabah penyakit (Faizah & Buchori, 2018). Menurut data Republika tahun 2019, Kabupaten Bima juga

merupakan daerah yang terdampak kekeringan di NTB sejak bulan Juli 2019, yaitu sebanyak 35 desa di sembilan kecamatan dengan jumlah 5,660 jiwa yang terdampak (Republika.com).

Agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kerugian ekonomi, sosial, psikologis, dan ekologis yang lebih besar, maka paradigma penanggulangan bencana harus bersifat preventif dan dilakukan dengan komitmen secara kelembagaan (Ulum, 2014). Selain itu juga diperlukan terobosan kebijakan yang efektif dan inovasi, penanggulangan bencana juga merupakan aktivitas yang sangat kompleks, multi stakeholder, multi dimensional, dan multi disiplin ilmu, sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi secara kelembagaan (Djalante, 2012).

Karena dengan kapabilitas kelembagaan Pemeritah Daerah yang mumpuni akan mampu memobilisasi sumber daya dengan menggunakan proses organisasi untuk mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana (Kusumasari, 2014). Sebab dengan kapabilitas organisasi yang baik akan membentuk kompetensi manajerial, pengetahuan dan keterampilan SDM, struktur kelembagaan yang efisien, kordinasi yang lebih baik, perencanaan strategis, dan kemampuan untuk membentuk Sumber Daya Manusia kreatif dan inovatif (Cabarcos *et al.*, 2015).

Selain itu, untuk mengukur kapabilitas kelembagaan pemerintah dapat dilihat pada kemampuan kepemimpinan, kemampuan internal organisasi dalam menguasai tugastugas yang kompleks, adanya mekanisme kolaborasi, partisipasi sumber daya manusia, adaptasi dan implementasi kebijakan yang efektif (*policy for effective implementation*), kapabilitas keuangan (*financial* capability), penggunaan teknologi, riset, dan pengembangan (Roghe *et al.*, 2012).

Untuk itu kapabilitas Kelembagaan merupakan bentuk dari kemampuan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menjawab sejauh mana kapabilitas kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam Penanggulangan Bencana. Kapabilitas ini menjadi sebuah tolak ukur pemahaman yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam upaya penanggulangan bencana yang akan dan telah dilaksanakan selama ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau dari keterangan pihak Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima. Selain itu juga didukung data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen Rencana Penaggulangan Bencana Kabupaten Bima, publikasi-publikasi, atau literatur berupa buku-buku, media cetak maupun online terkait dengan upaya-upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bima. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mendeskripsikan hasil penelitian, penulis membatasi beberapa indikator untuk menjelaskan kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam penanggulangan Bencana seperti, kepemimpinan, kemampuan internal organisasi dalam menguasai tugas-tugas yang kompleks, mekanisme kolaborasi, Kapabilitas sumber daya manusia (*Hu*man resource capability), adaptasi dan implementasi kebijakan yang efektif (*policy for effective implementation*), kapabilitas keuangan (*financial* capability), penggunaan teknologi, riset, dan pengembangan.

Kepemimpinan

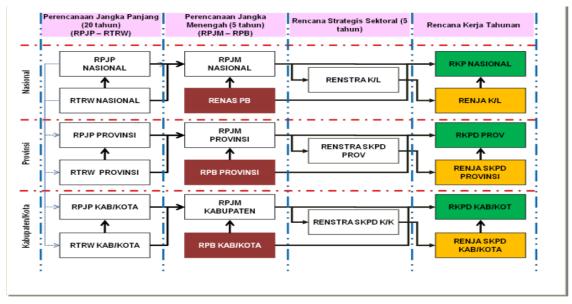
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, dan upaya memberikan pemahaman agar setuju dengan apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan organisasi (Williams, 2005). Selain itu, kepemimpinan akan mencakup tiga unsur yaitu kharisma, stimulasi intelektual (intellectual stimulation), dan perhatian (Bass & Steidlmeier, 1998). Dengan kepemimpinan akan membentuk tindakan yang begitu produktif, dan mampu menggiring pengikutnya mencapai tujuan-tujuan bersama (Alfian, 2013).

Sehingga kemampuan kepemimpinan akan sangat dibutuhkan dalam upaya mengintegrasikan program penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, serta kegiatan sosialisasinya kepada masyarakat di Kabupaten Bima. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 dimana terdapat 5 hal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, sekaligus menjadi standar kemampuan kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. Pengalokasian dana penanggulangan bencana daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai pada setiap tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana
- d. Penjaminan pemenuhan hak dasar masyarakat korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum meliputi pangan, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, penampungan dan tempat hunian sementara, dan pelayanan psikososial; dan
- e. Pemulihan kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat, infrastruktur, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

Aktifitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bima baik yang telah dilakukan maupun yang akan di proyeksikan semua tertuang dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2018-2022, sebagai dokumen induk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang melingkupi seluruh fase penanggulangan bencana di Kabupaten Bima. Dokumen RPB merupakan "*master plan*" atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk periode 5 tahun. Dokumen RPB merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi Pemerintahan Daerah yang terlibat.

Berikut adalah gambar Rencana Penanggulangan (RPB) tahun 2018-2022 dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bima;



Gambar 1. Posisi Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan/

Sumber: Dokumen RPB Kab. Bima tahun 2018

Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan upaya sosialisasi dan publikasi data kajian resiko kebencanaan seperti kajian ancaman, kajian kerentanan, dan kajian kapasitas. Kajian risiko bencana dilakukan sebagai strategi untuk mengurangi risiko bencana di Kabupaten Bima.

Pengkajian resiko bencana dilakukan untuk menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan di Kabupaten Bima. Dalam pengkajian resiko Bencana melibatkan BPBD, Bappeda, Dinsosnaker, Kesbangpol, Dishubkominfo, BMKG, BPMPKB, PU, Dinkes, dan Desa rentan bencana.

Berdasarkan data hasil analisis peta resiko bencana dan bahaya yang tertuang dalam RPB Daerah Kabupaten Bima, dapat dijelaskan bahwa jenis bahaya yang ada di Kabupaten Bima memiliki tingkat yang bervariasi. Tingkatan ini dapat dilihat dari luasan daerah dan pengelompokan nilai indeks dari potensi bahaya tersebut.

Penentuan tingkat resiko dan bahaya disesuaikan dengan jenis potensi bahaya yang terjadi di suatu daerah. Dengan data tingkat bahaya diperoleh dari hasil pengkajian bahaya rendah, sedang, atau tinggi yang memiliki luas bahaya yang paling besar. Skala indeks bahaya dibagi kedalam tiga kategori yaitu rendah (nilai indeks 0 - 0,33), sedang (nilai indeks 0,34 - 0,66) dan tinggi (nilai indeks (0,67 -1). Berikut adalah tingkat bahaya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bima;

Tabel 1.

Tingkat bahaya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bima

No.	Jenis Bahaya	Indeks Bahaya	Tingkat Bahaya			
1	Banjir	0,663	Sedang			
2	Cuaca Ekstrim	0,6326	Sedang			
3	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,333	Rendah			
4	Gempabumi	0,6025	Sedang			
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,5522	Sedang			
6	Kekeringan	0,8919	Tinggi			
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,7938	Tinggi			
8	Letusan Gunungapi	0,333	Rendah			
9	Tanah Longsor	0,8175	Tinggi			
10	Tsunami	0,889	Tinggi			

Sumber: RPB BPBD Kabupaten Bima Tahun 2018-2022

Data diatas menunjukkan, hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Bima, didapatkan total luasan wilayah yang terdampak bahaya banjir seluas 38,74%

(430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Bima. Dengan demikian maka didapatkan tingkat bahaya banjir di Kabupaten Bima adalah **Sedang**. Sedangkan cuaca ekstrim didapatkan total luasan wilayah yang terdampak bahaya seluas **99,88%** (430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Bima. Dengan demikian maka didapatkan tingkat bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Bima adalah **Sedang**.

Sedangkan untuk kasus epidemi dan penyakit, berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Bima, didapatkan total luasan wilayah yang terdampak bahaya seluas 100,00% (430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Bima. Dengan demikian maka didapatkan tingkat bahaya epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Bima adalah Rendah. Dengan parameter bencana epidemi dan wabah penyakit adalah kepadatan penderita malaria, kepadatan penderita demam berdarah, kepadatan penderita HIV/AIDS, dan kepadatan penduduk dimana belum terdapat Covid-19 sebagai indikatornya. Jikapun menggunakan indikator Covid-19, dimana data Covid-19 sampai dengan tanggal 24 Sepetember 2020, tercatat 40 Orang dinyatakan sembuh, 13 orang masih Isolasi, dan 3 orang meninggal dunia di Kabupaten Bima.

Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bima, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bima telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Sedangkan gempa Bumi, didapatkan total luasan wilayah yang terdampak bahaya seluas 6,68% (430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Bima. Dengan demikian maka didapatkan tingkat bahaya gempabumi di Kabupaten Bima adalah Sedang. Demikian gelombang ekstrim, didapatkan total luasan wilayah yang terdampak bahaya seluas 100,00% (430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Bima. Dengan demikian maka didapatkan tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Bima adalah Sedang.

Bahaya kekeringan didapatkan total luasan wilayah yang terdampak bahaya seluas 99,88% (430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Bima. Sehingga tingkat

bahaya kekeringan di Kabupaten Bima adalah **Tinggi.** Saaat ini Kabupaten Bima memang tidak hanya diselimuti ketakutan oleh Pandemi Covid-19, namun situasi Kabupaten Bima juga sedang siaga darurat kekeringan. Penetapan status ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima, tentang status keadaan siaga darurat penanganan kekeringan di wilayah Kabupaten Bima tahun 2020 dengan Nomor: 188.45/435/06.23 Tahun 2020.

Beberapa Kecamatan yang mengalami kekeringan yaitu Kecamatan Soromandi, Donggo, Bolo, Woha, Madapangga, Palibelo, belo dan Parado. Adapun Desa-desa yang mengalami kekeringan dengan kondisi kritis tiap tahun seperti Kalampa, Samili, dan Waduwani Kecamatan Woha. Kemudian Bre dan Belo Kecamatan Palibelo. Kemudian Desa Rada dan Sanolo Kecamatan Bolo, Desa Bajo dan Kananta Kecamatan Soromandi.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bima perlu segera menerapkan peraturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air di daerah yang beresiko kekeringan, kemudian melaksanakan pembangunan perbaikan jaringan utama irigasi sebagai langkah konkrit untuk mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Bima.

Demikian juga dengan Kebakaran hutan dan lahan didapatkan total luasan wilayah yang terdampak bahaya seluas 98,55% (430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Bima. Dengan demikian maka didapatkan tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bima adalah Tinggi. Selain itu bencana kebakaran pemukiman warga juga sering terjadi dari kurun waktu 2019 hingga tahun 2020, tercatat sebanyak 12 kasus Kebakaran yang menyebabkan ratusan rumah hangus di 6 Kecamatan yaitu Belo, Woha, Sape, Lambu, Langgudu, dan Parado dengan kerugian ditaksir mencapai Puluhan Miliar Rupiah.

Bencana kebakaran menjadi catatan buruk bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, respon yang lamban dan keberadaan Mobil Damkar yang masih kurang menjadi pemicu terjadinya peningkatan kasus dan kerugian yang terjadi akibat kebakaran. Kabupaten Bima saat ini baru memiliki 10 unit transportasi Pemadam Kebakaran tersebut, yang tentunya belum bisa didistribusikan ke 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Bahkan kecamatan Sanggar, Tambora, Parado, dan Belo belum tersedia sama sekali.

Kebijakan yang diterapkan saat ini ialah 1 Damkar menghandle dua sampai tiga Kecamatan, tentu ini belum representatif untuk menghandle kebakaran di berbagai wilayah di Kabupaten Bima yang sangat luas. Hasil temuan menunjukkan bahwa

dalam situasi darurat bencana kebakaran di Kabupaten Bima, masih terjadi kegagapan penanganan dan kesimpangsiuran informasi dan data korban, sehingga mempersulit dalam pengambilan kebijakan untuk penanganan darurat bencana. Sistem koordinasi juga sering kurang terbangun dengan baik, lemahnya respon penanganan dan penyaluran bantuan. Situasi dan kondisi di lapangan yang seperti itu disebabkan belum terciptanya mekanisme kerja pos komando dan koordinasi tanggap darurat bencana kebakaran yang baik, terlebih jarak askes tiap kecamatan yang sangat jauh. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus cepat merespon lahirnya Permendagri Nomor 16 tahun 2020 tentang Pemebentukkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Mandiri disetiap daerah, sebagai bentuk pendekatan dan percepatan pelayanana kepada masyarakat.

Sedangkan untuk tingkat ancaman bencana letusan gunung api, didapatkan total luasan wilayah yang terdampak bahaya seluas 99,90% (430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Bima atau dengan kategori Rendah. Tanah longsor didapatkan total luasan wilayah yang terdampak bahaya seluas 61,15% (430.172 Ha) dengan kategori Tinggi. Demikian juga Tsunami, didapatkan total luasan wilayah yang terdampak bahaya seluas 3,51% (430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Bima atau dengan kategori Tinggi. Gelombang tinggi dan banjir rob juga menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat pesisir Kabupaten Bima. Untuk merespon ancaman tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melakukan upaya konservasi Mangrove diluar Kawasan Hutan sebagai kebijakan merespon perubahan iklim di pesisir Kabupaten Bima.

Namun dalam upaya konservasi tersebut mendapati masalah, dimana kawasan mangrove dialihkan menjadi lahan tambak dan Pemukiman, selain itu penggunaan kayu mangrove untuk kebutuhan memasak menyebabkan kehilangan dan kerusakan kawasan dalam jumlah banyak. Tercatat dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima sekitar 550 hektar hutan mangrove yang berada disepanjang pesisir Kecamatan Sape, Lambu, Langgudu, dan Palibelo, dimana sekitar 267 hektar mengalami kerusakan parah. Lemahnya penegakan hukum menjadi kendala utama dalam upaya konservasi mangrove.

Berdasarkan upaya sosialiasi dan publikasi data tingkat risiko bahaya diatas, bahwa kemampuan Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam penanggulangan bencana menunjukkan tren positif dalam upaya pelaksanaan fungsi Komando, fungsi koordinasi, dan fungsi pelaksanaan terutama dalam upaya publikasi data risiko kebencanaan.

Namun di sisi lain masih ada program kegiatan yang belum berjalan maksimal karena kurangnya daya dukung sumber daya terutama sumber daya keuangan. Jika merujuk pada peraturan Perundang-undangan, minimal anggaran untuk penanggulangan bencana adalah 1% dari APBD, namun pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sampai dengan tahun 2020, pagu anggaran dalam penanggulangan bencana belum memenuhi angka 1 persen tersebut, dengan alasan bahwa banyak sektor yang menjadi urusan prioritas Pembagunan Pemerintah selain pada urusan manajemen kebencanaan.

Untuk itu perlu *political will* kepala Daerah untuk dapat memprioritaskan program manajemen bencana secara terintegrasi dan meningkatkan sosialisasinya secara kelembagaan dan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah harus menginisiasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah yang harus selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bima. Kemudian perlunya pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.

Kemampuan Internal Organisasi Dalam Menguasai Tugas-Tugas Yang Kompleks

Pada dasarnya wilayah Kabupaten Bima memiliki kondisi geologis, geografis, demografis, dan sosial budaya yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun akibat ulah manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak ekonomi dan psikologis, serta korban jiwa, sehingga diperlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Untuk merespon beban kerja yang kompleks itu diperlukan pengaturan kelembagaan yang efektif dengan memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level Pemerintah. Demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai unsur pelaksana penaggulangan Bencana di Daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan sekaligus pelaksana penaggulangan bencana di Daerah.

Untuk melihat indikator kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya melakukan tugas-tugas yang kompleks dalam penanggulangan bencana dapat dilihat pada indeks ketahanan Daerah Kabupaten Bima terhadap bencana. Dimana berdasarkan Indeks *Hyogo Framework For Action* (HFA), maka Kabupaten Bima berada pada skala/level 3. Berikut adalah tabel hasil kajian tingkat ketahanan Kabupaten Bima berdasarkan hasil survey Indiktor HFA;

Tabel 2.
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bima berdasarkan Survey HFA

No	Prioritas	Total Nilai Prioritas	Indeks Prioritas	
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar 82,5 4 kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya			
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini 62,5 3			
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan disemua tingkat	30	1	
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	63,75	3	
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	83,75	4	
TOTAL	NILAI PRIORITAS	64,5		
INDEK	S KETAHANAN DAERAH	3		

Sumber: Dokumen RPB Kab. Bima tahun 2018-2022

Indeks ketahanan bencana Kabupaten Bima berada pada level 3. Hal ini menjelaskan bahwa Kabupaten Bima telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis serta lemahnya daya dukung anggaran dalam penanggulangan bencana. Sehingga untuk mencapai indeks/level 5 Pemerintah Daerah harus memiliki capaian komprehensif dengan komitmen dan kapasitas yang memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.

Kemudian pada aspek tingkat kesiapsiagaan Daerah Kabupaten Bima terhadap berbabagai bencana. Pada *framework* yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan masyarakat terdiri dari 5 paramater. Adapun Paramater-parameter tersebut adalah:

- 1. Pengetahuan Kesiapsiagaan
- 2. Pengelolaan Tanggap Darurat
- Pengaruh Kerentanan Masyarakat terhadap Upaya Pengurangan Risiko Bencana
- 4. Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah,
- 5. Bentuk Partisipasi Masyarakat,

Framework kesiapsiagaan daerah dengan 5 paramater tersebut digunakan untuk mengetahui level / nilai kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana di tingkat desa di Kabupaten Bima. Secara umum tujuan pengkajian kesiapsiagaan masyarakat merupakan kunci penilaian

tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi di Daerah.

Parameter kesiapsiagaan ini akan menentukan kelas indeks kesiapsiagaan. Nilai indeks kesiapsiagaan kabupaten Bima merupakan penggabungan rata-rata nilai indeks setiap parameter untuk setiap bahaya pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Kelas indeks kesiapsiagaan Kabupaten Bima ditentukan berdasarkan nilai indeks kesiapsiagaan kecamatan.

Sehingga didapati hasil analisis data tingkat kesiapsiagaan Daerah Kabupaten Bima dengan *tools* yang ada memperoleh tingkat kesiapsiagaan Kabupaten Bima pada level rendah dan sangat menghawatirkan. Secara umum tingkat kesiapsiagaan Kabupaten Bima dalam menghadapi bahaya bencana banjir, Gempabumi, tsunami, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, dan epidemi dan wabah penyakit, berada pada tingkat kesiapsiagaan rendah.

Mekanisme Kolaborasi (Collaborative Government)

Pada dasarnya keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana tentu sangat mengacu pada kemampuan lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk membuat kebijakan dan melaksanakannya secara efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana antaralain, dilakukan melaui prinsip-koordinasi, keterpaduan, kemitraan, dan pemberdayaan.

Untuk itu syarat pokok dalam upaya penanggulangan bencana adalah keterpaduan antar lembaga dan sektor dalam prinsip integratif yang berdasar pada kerjasama atau kemitraan antar seluruh pihak termasuk dengan masyarakat lokal. Karena dengan keterlibatan seluruh element sebagai perwujudan yang demokratis partisipatif dalam upaya penanggulangan bencana sehingga nantinya akan mampu mengidentifikasi, mengkodifikasikan, dan berbagi pengetahuan yang kemudian dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bima.

.Sebagai *leading sector* dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD berupaya untuk mengimplementasikan program-program yang ada dalam Dokumen RPB Daerah Kabupaten Bima dengan kerjasama lintas sektoral di instansi terkait penanggulangan bencana. Pencapaian upaya penanggulangan bencana akan optimal jika terjalin kerjasama antara BPBD Kabupaten Bima dengan SKPD dan Instansi terkait.

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD Kabupaten Bima bertindak sebagai koordinator, fasilitator, motivator, sekaligus pelaksana program-program. Namun karena keterbatasan sumberdaya yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana juga menjadi salah satu faktor pertimbangan utama BPBD perlu menerapkan strategi khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara umum strategi ini bersifat kolaboratif dalam pembuatan dokumen rencana, dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bima.

Saat ini terdapat enam strategi penanggulangan bencana kolaboratif yang dilakukan oleh BPBD bersama BAPPEDA, Dinsosnaker, KESBANGPOL, Dishubkominfo, BMKG,BPMPKB, PU, DINKES, dan Desa-desa yang ada di Kabupaten Bima yaitu,

- 1. Perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan
- 2. Perencanaan penanggulangan bencana terpadu
- 3. Pendidikan, penelitian dan pelatihan
- 4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat
- 5. Pengurangan risiko bencana
- 6. Peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana

Untuk itu, sebagai aktifitas yang membutuhkan peran *multi-stakeholder*, antar sektor, antara ilmu pengetahuan dan manajemen dengan aktifitas yang kompleks, yang membutuhkan keterlibatan banyak sektor dan sumber daya, maka secara garis besar, peran dan fungsi tipa-tiap SKPD dan Lembaga Pemerintah di tingkat Kabupaten Bima dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima berperan mengkoordinir, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bima.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendukung perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pengalokasian anggaran programprogram pembangunan yang peka risiko bencana bersama dengan dinas-dinas terkait.
- c. Dinas Sosial, dan tenaga kerja berperan merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik (pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya) untuk korban bencana.
- d. Dinas Kesehatan berperan dalam merencanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana

- kesehatan termasuk obat-obatan, logistik kesehatan, dan tenaga medis/paramedis.
- e. Dinas Pekerjaan Umum berperan merencanakan, mengendalikan, dan menyiapkan lokasi dan jalur evakuasi, kebutuhan pemulihan sarana/prasarana publik, dan pengadaan fasilitas darurat serta mengkoordinasikan pembangunan perumahan untuk warga yang menjadi korban bencana serta melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana.
- f. Dinas Pendidikan berperan dalam merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana serta menerapkan sekolah aman bencana.
- g. Dinas Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana geologi, ekologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi.
- h. Dinas kelautan dan Perikanan, juga Pertanian dan Ketahanan Pangan berperan dalam merencanakan, mendukung, dan mengendalikan penyediaan bahan pangan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
- Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi membantu penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara dan melakukan penyiapan dan pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana.
- j. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berperan mendorong, mempromosikan, menggalang investasi dan penamaman modal terkait usaha masyarakat di daerah bencana.
- k. Satpol PP dan LINMAS pengawalan, pengamanan posko-posko bencana dan distribusi logistik dan membantu dalam pemasangan dan pemeliharaan ramburambu rawan bencana, LINMAS berperan dalam membantu dan mengevakuasi masyarakat yang ditimpa bencana.
- Rumah sakit berperan membantu pelayanan kesiapsiagaan, mitigasi, dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan.

Namun pada kenyataannya di lapangan terkait dengan fungsi koordinasi kelembagaan antara BPBD dengan instansi lainnya dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bima ternyata belum menunjukkan hasil yang efektif. Diketahui adanya indikasi-indikasi permasalahan sebagai berikut:

a. Pada pra bencana, banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang

proaktif dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan simulasi. Terlihat pada waktu simulasi tanggap bencana menurut keterangan dari BPBD banyak yang tidak hadir.

b. Alur pengambilan keputusan dan peran dari tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah masih tidak meyeluruh. Tercermin dari belum adanya kesamaan pandangan maupun action di lapangan terutama pada upaya tanggap darurat dan mitigasi

Kapabilitas Sumber Daya Manusia (Human Resource Capability)

Dalam upaya penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara mendadak melainkan butuh persiapan yang dilakukan bahkan jauh sebelum bencana itu datang, melalui proses yang disebut manajemen bencana. Salah satu persiapan yang dilakukan sebelum bencana itu datang adalah dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan baik. Baik sumber Daya manusia internal Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), maupun seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bima. Mengingat bencana alam tidak bisa diketahui secara pasti kapan dan dimana akan terjadi, sehingga perlu adanya kesiapan Sumber Daya Manusia yang siap dan tanggap dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi.

Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penaggulangan bencana adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas, kemampuan, peningkatan kesadaran, kepercayaan diri, dan pengembangan kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam peanggulangan bencana, internal BPBD maupun lembaga Pemerintah di tingkat Kabupaten Bima melakukan pengembangan secara informal dimana pegawai membaca dan mempelajari literature/buku tentang upaya penaggulangan Bencana. Sedangkan Pengembangan secara formal, dimana pegawai diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan tangguh bencana.

Selain itu dalam upaya penguatan Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Bima melalui program optimalisasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan bencana, melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam aksi tanggap darurat dan pascabencana. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bima juga melakukan pelatihan peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan perbaikan kerusakan lahan/lingkungan secara mandiri, agar tercipta kemampuan masyarakat dalam melakukan prediksi perkembangan kejadian bencana, penilaian kerusakan serta taksiran kebutuhan masa tanggap darurat. Selain itu juga Penggalangan kontribusi

dukungan partisipasi sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara formal maupun informal tersebut dapat membantu BPBD dalam melakukan tahapan-tahapan manajemen bencana. Namun upaya ini juga mendapati kendala yaitu, keterbatasan sumber daya keuangan, lemahnya motivasi pegawai dan partisipasi masyarakat, serta daya dukung kebijakan Pemerintah Daerah yang minim.

Kapabilitas Keuangan (Financial Capability),

Pada dasaranya bencana diartikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dampak psikologis, maupun kerugian harta benda. Untuk itu diupayakan penyelenggaraan penaggulangan bencana sebagai rangkaian aktifitas yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi.

Menurut Kusumasari (2014), sumber daya dan faktor penting yang harus dilihat dalam menilai atau mengukur kapabilitas organisasi Pemerintahan di cakupan daerah dalam upaya penanggulangan bencana adalah selain pada sumber daya manusia dan kelembagaan, yang terpenting adalah keuangan.

Aktivitas keuangan dalam kelembagaan merupakan suatu urat nadi untuk pelaksanaan pekerjaan dalam penanggulangan bencana. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penaggulangan Bencana, dimana pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat didalamnya. Keuangan di BPBD Kabupaten Bima terbagi menjadi tiga bagian yaitu untuk pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi pada kedaruratan bencana di Kabupaten Bima paling banyak menyerap kebutuhan anggaran terutama dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar saat dan pasca bencana, perlindungan kelompok rentan, serta pembangunan fasilitas kritis yang rusak. Daerah yang teridentifikasi berpotensi terjadi bencana dalam skala besar seperti Kabupaten

Bima perlu untuk memiliki cadangan anggaran dan kebutuhan lainnya sesuai dengan rencana kontijensi daerah untuk bencana tersebut.

Dalam kasus kekeringan air bersih dimana hasil identifikasi dari BMKG akan berlangsung pada bulan juni sampai November Tahun 2020 misalnya. Curah hujan yang tidak ada sehingga menimbulkan darurat kekeringan di hampir semua wilayah di Kabupaten Bima seperti di Kecamatan Soromandi, Donggo, Bolo, Woha, Madapangga, Palibelo, belo dan Parado. Sebagai badan penaggulangan bencana, BPBD mengambil langkah-langkah dengan mengupayakan Penyaluran air bersih pada lokasi yang terdampak kekeringan.

Penyaluran Air bersih sebanyak 20.000 Liter Per-hari dan itu hanya bisa mencakup 1 Desa, tentu jumlah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat yang terdampak, itu pun baru mencakup air Minum belum untuk kegiatan lainnya seperti mandi, mencuci maupun memasak. Keterbatasan tersebut diakibatkan oleh minimnya dana operasional dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bima.

Dalam SK Bupati Bima, dimana untuk penyaluran Air bersih terhitung mulai 1 september tahun 2020. Namun mengingat keterbatasan sumber daya Pemerintah Kabupaten Bima, sehingga pada bulan Oktober, akan ada bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB untuk penyediaan air bersih.

Dalam rangka mengatasi kendala minimnya penganggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Bima, BPBD bersama SKPD terkait yang kesulitan ketika melakukan upaya tanggap darurat, demikian juga upaya rekonstruksi dan rehabilitasi, walaupun juga didukung oleh dana APBD yang notabene belum mampu menyediakan minimal satu persen yang diharapkan Undang-Undang. Demikian dengan sumbangan APBN, dan dana siap pakai, namun tetap belum memadai dan representatif, maka diperlukan kesadaran sosial yang lebih tinggi pada pihak legislatif dan eksekutif dalam mengembangkan politik anggaran di APBD Kabupaten Bima sehingga ke depan akan meningkat persentase untuk biaya penanggualangan bencana yang notabene tingkat ketahanan bencana yang sangat rawan dan menghawatirkan.

Namun saat ini Pengembangan Desa Tangguh Bencana sudah terintegrasi dengan dana Desa melalui Anggaran pemerintah yang bisa diakses oleh Desa dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat. Dimana diatur dalam PERMENDES nomor 19 tahun 2017 dan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Kegiatan desa tangguh bencana sudah menjadi tren dan semua berlomba untuk menyelenggarakan desa tangguh bencana baik BPBD, NGO, dan Perguruan Tinggi serta Dunia Usaha, maka

tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bima adalah mensinkronkan program-program ketangguhan masyarakat ke dalam Desa Tangguh Bencana.

Selain itu, dalam perencanaan kegiatan penanggulangan bencana juga perlu dialokasikan pagu anggaran dari setiap kegiatan. Secara umum, setiap kegiatan memiliki indikator pencapaian yang harus dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana beserta SKPD terkait dalam 5 (lima) tahun masa perencanaan ini. Berikut adalah uraian pembagian alokasi anggaran sesuai mekanisme zonasi dalam penanggulangan bencana Kabupaten Bima dalam memfokuskan upaya pengurangan risiko bencana kepada beberapa daerah yang paling rentan.

Tabel 3.
Rekapitulasi Anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bima

STRATEGI DENIANGGUI ANGAN DENGANA	Tahun Anggaran (dalam Juta Rupiah)				
STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA	1	2	3	4	5
PERKUATAN ATURAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	4,2	4,2	7	0	0
PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA TERPADU	3,3	3,3	5,5	5,5	5,5
3) PENDIDIKAN, PENELITIAN, DANPELATIHAN	1,8	1,8	3	0	0
 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 	6,9	6,9	11,5	11,5	11,5
5) PENGURANGAN RISIKO BENCANA	2	2	2	2	2
6) PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGANAN DARURAT BENCANA *	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
7) OPTIMALISASI PEMULIHAN DAMPAK BENCANA*	0	0	0	0	0
TOTAL PAGU INDIKATIF	43,4	43,4	54,2	44,2 A	ct 44,2 e Wii

Sumber: RPB BPBD Kabupaten Bima tahun 2018-2022

Kemudian berikut ini adalah program prioritas per jenis bahaya dan sumber Anggaran untuk setiap aksi dikelompokan kepada anggaran yang didapatkan dari APBD, kerjasama dengan pihak lain, maupun bantuan vertikal dari Provinsi/Nasional;

Tabel 4
Indikator, Keterlibatan Institusi dan Pagu Indikatif Penanggulangan Bencana
Daerah.

RENCANA AKSI	KETERLIBATAN	SUMBER PENGANGGARAN			
	INSTANSI	Mandiri	Kerjasama	Vertikal	
Rencana 21 Aksi	Utama : Bpbd	70%	15%	15%	
Untuk Penanganan	Pendukung : Bappeda, Dinsosnaker,				
Bencana Banjir	Kesbangpol, Dishubkominfo, Bmkg, Bpmpkb, PU, Dinkes, Desa/Kelurahan				
Rencana 12 Aksi	Utama : Bpbd	70%	15%	15%	
Penanganan Cuaca	Pendukung : Bappeda, Dinsosnaker,				
Ekstrim	Kesbangpol, Dishubkominfo, Bmkg,				
	Bpmpkb, PU, Dinkes, Desa/Kelurahan				
Rencana 13 Aksi	Utama : Bpbd	70%	15%	15%	
Penanganan Bencana	Pendukung : Bappeda, Dinsosnaker,				
Gempabumi	rpabumi Kesbangpol, Dishubkominfo, Bmkg, Bpmpkb, PU, Dinkes, Desa/Kelurahan				

Sumber: RPB BPBD Kabupaten Bima tahun 2018-2022

Perhitungan anggaran kegiatan penanggulangan bencana pada umumnya terbagi atas dua bagian. Anggaran pertama merupakan anggaran periodik yang merupakan pembebanan tahunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima. Anggaran ini dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa sebelum bencana terjadi. Kemudian Alokasi anggaran untuk perencanaan selama 5 tahun sesuai dengan dokumen RPB yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dengan mempertimbangkan asumsi kenaikan inflasi sebesar 10% pertahun. Anggaran kedua adalah anggaran khusus untuk penanganan darurat dan pemulihan bencana. Anggaran ini disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersifat dana siap pakai di Kabupaten Bima. Bila hasil kajian cepat bencana apabila melebihi kemampuan anggaran siap pakai daerah, maka direkomendasi status darurat bencana provinsi. Dimana Pengalokasian anggaran khusus nantinya akan menjadi pertimbangan dan rekomendasi dari kepala BPBD Kabupaten Bima.

Kebijakan penanggulangan bencana sampai menjadi aksi untuk setiap program dan fokus prioritas yang telah disusun kemudian dibuatkan alokasi penganggaran. Namun anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Bima seperti yang disampaikan sebelumnya, belum mampu mengikuti asumsi di tingkat Nasional bahwa minimal anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 1% dari total keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun rendahnya kemampuan penganggaran diatas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan sesuai dengan aturan

dan mekanisme yang berlaku, dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana pada pra, saat, maupun pasca bencana. Misalnya bencana banjir bandang pada tahun 2017, dimana Pemda lewat BPBD mendapat bantuan Hibah sebanyak 11 Milliar dari BNPB untuk merelokasi rumah-rumah korban bencana."

Adaptasi dan Implementasi Kebijakan yang Efektif (*Policy For Effective Implementation*),

Kebijakan penanggulangan bencana merupakan suatu kebijakan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip dasar penanggulangan bencana di Kabupaten Bima. Prinsip ini harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima dan selaras dengan prinsip penanggulangan bencana provinsi dan Nasional yang mengupayakan prinsip cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan.

Namun fungsi dan prinsip diatas belum maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Indeks ketahanan bencana Kabupaten Bima berada pada level 3. Capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Demikian pula pada aspek tingkat kesiapsiagaan Daerah yang berada pada level rendah dan sangat menghawatirkan.

Rendahnya level ketahanan dan kesiapsigaan Daerah dalam upaya penanggulangan setiap jenis Bencana, otomatis berdampak pada kapasitas atau kemampuan dalam upaya mengurangi resiko bencana di Daerah Kabupaten Bima. Kapasitas atau kemampuan merupakan hal terpenting yang harus di tingkatkan dalam menyelenggarakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bima baik secara individu maupun secara kelompok.

Berikut adalah tabel Kapasitas atau kemampuan Daerah Kabupaten Bima dalam mengurangi resiko bencana;

Tabel 5. Tingkat Kapasitas Bencana di Kabupaten Bima

No	Bencana	Indeks Kapasitas Daerah		Indeks Kesiapsiagaan Desa		Tingkat Kapasitas Daerah	
		Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat
1	Banjir	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,3022	Rendah
2	Cuaca Ekstrim	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,4662	Sedang
3	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,4662	Sedang
4	Gempabumi	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,4662	Sedang
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,2664	Rendah
6	Kekeringan	0,666	Sedang	0,4605	Sedang	0,4662	Sedang
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,666	Sedang	0,4564	Sedang	0,2839	Rendah
8	Letusan Gunungapi	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,3024	Rendah
9	Tanah Longsor	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,4662	Sedang
10	Tsunami	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,4662	Sedang

Sumber: Dokumen RPB BPBD Kabupaten Bima Tahun 2018-2022

Data tingkat Kapasitas Daerah dalam penanggulangan Bencana di atas didapat melalui kajian tingkat kapasitas yang diukur pada aspek ketahanan daerah berdasarkan HFA dan aspek kesiapsiagaan masyarakat melalui data PODES dan indepthinterview pada pemangku jabatan di tingkat kecamatan di Kabupaten Bima.

Dari data diatas menunjukkan, bahwa akibat lemahnya indeks kapasitas daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana, menyebabkan tingkat kesiapsiagaan Desa terhadap berbagai jenis bencana juga rendah, otomatis tingkat resiko yang akan terjadi pada masyarakat sangat rentan.

Padahal sebagai pelajaran, kejadian bencana di Indonesia selama ini telah menghasilkan banyak korban jiwa akibat lemahnya persiapan dan kesiapsiagaan masyarakat yang rendah, terutama dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kepedulian akan fenomena dan bencana yang akan terjadi. Pemerintah dan masyarakat Indonesia selama ini memfokuskan pengelolaan bencana pada kegiatan tanggap darurat dan kegiatan rehabilitasi, serta rekonstruksi pascabencana. Namun kesiapsiagaan masyarakat belum menjadi prioritas kegiatan.

Kemudian untuk memperkuat kesiapsiagaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima perlu menerapkan kebijakan kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana. Kemudian rencana kontingensi bencana yang siap di semua jenjang Pemerintahan, pengadaan latihan reguler untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana. Serta yang paling penting Pemerintah

Daerah harus menyediakan cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanggulangan bencana yang efektif.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima adalah dengan menetapkan bencana prioritas. Penentuan bencana prioritas di Kabupaten Bima dengan menggunakan matrik bencana prioritas berdasarkan data tingkat risiko bencana, dan data kecenderungan kejadian bencana untuk masing-masing jenis bencana. Data tingkat risiko bencana di dapat dari hasil analisis data dan peta risiko bencana, sedangkan data kecenderungan kejadian bencana masing-masing jenis bencana diperoleh melalui website resmi BNPB yaitu www.bnpb.dibi.go.id sebagai pangkalan data dan informasi kebencanaan Indonesia, dan juga dukungan data dari BPBD Kabupaten Bima.

Kebijakan Penetapan Bencana prioritas tersebut diadaptasi menjadi kebijakan daerah dalam penanggulangan bencana akibat adanya keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah. Berikut adalah tabel data penetapan bencana prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima;

Tabel 6. data bencana Prioritas Penanggulangan Bencana

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Kecenderungan Risiko Kejadian	Tingkat Prioritas
1	Banjir	Tinggi	Naik	Prioritas 1
2	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tetap	Prioritas 1
3	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang	Tetap	Prioritas 2
4	Gempabumi	Sedang	Tetap	Prioritas 2
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Tetap	Prioritas 1
6	Kekeringan	Tinggi	Tetap	Prioritas 2
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tetap	Prioritas 2
8	Letusan Gunungapi	Tinggi	Tetap	Prioritas 1
9	Tanah Longsor	Tinggi	Tetap	Prioritas 1
10	Tsunami	Sedang	Tetap	Prioritas 2

Sumber: Dokumen RPB BPBD Kabupaten Bima 2018-2022

Prioritas utama penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Bima pada jenis-jenis bencana yang berada pada prioritas 1 dan prioritas 2 yang berada pada zona merah dalam matrik penentuan bencana prioritas.

Kemudian dalam menyebarkan informasi dan mensosialisasikan berbagai program untuk mendukung kinerja BPBD Kabupaten Bima, humas BPBD maupun humas Pemerintah Daerah harus aktif menggunakan media sosial. Agar lebih mudah dan efektif dalam membangun budaya sadar bencana untuk masyarakat Kabupaten

Bima. Hal ini dianggap efektif karena rata-rata Masyarakat Kabupaten Bima sudah melek teknologi dan informasi serta penggunaan media sosial. Penggunaan media Fanpage Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube menjadi alternatif sebagai aksi untuk penyebaran informasi yang efektif dan efisien dalam mensosialisasikan upaya peanggulangan bencana Daerah Kabupaten Bima.

Penggunaan Teknologi, Riset dan Pengembangan

Salah satu sarana yang vital diperlukan dalam penanggulangan bencana alam adalah teknologi komunikasi dan informasi (Sosiawan, 2014). Selama ini Pemerintah Daerah tampaknya memiliki kegagapan dalam upaya mengantisipasi bencana khususnya dalam dukungan sarana sistem komunikasi dalam penanggulangan bencana. Dukungan sistem komunikasi yang tidak memadai akan berdampak padal lambannya koordinasi dan penanganan. Akibat yang lebih parah lagi adalah terjadinya kegagapan dan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar yang senantiasa terulang kembali tiap kali bencana alam datang.

Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tergolong rawan bencana. Maka dari itu akan sangat membantu jika penggunaan teknologi maju diterapkan dalam penanganan bencana terutuama ketika bencana alam datang agar lebih cepat mendapat respon dari pusat. Selain itu, penggunaan teknologi juga untuk mempermudah koordinasi dalam penanganan bencana di Kabupaten Bima.

Sebab respon cepat penanganan bencana merupakan salah satu indikator kinerja penanggulangan bencana di Daerah. Sebagai bentuk peningkatan kinerja penanganan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima sudah didukung pengoperasikan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdolops) Penanganan Bencana.

Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Bima telah dilengkapi beberapa unit komputer untuk verifikasi dan pengolahan data kebencanaan. Kehadiran perangkat komunikasi canggih ini diharapkan semakin mempercepat akses informasi dan kaji cepat dampak bencana oleh personel BPBD. Disamping memudahkan mitigasi bencana dan semakin cepat mengambil keputusan dalam penanganan bencana

Pada tahun 2020, Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, telah mendapatkan hibah seperangkat alat komunikasi berupa 1 monitor mondopad 2.0 ukuran 80 inci, senilai Rp 1,6 miliar. Alat ini digunakan untuk berkoordinasi dalam penangan bencana di daerah ke BNPB. Alat ini merupakan alat tercepat untuk mengatasi penanganan bencana di Kabupaten Bima. Selain itu ditahun

yang sama BPBD Kabupaten Bima mendapat bantuan dari BNPB dan BMKG kaitannya dengan alat pendeteksi longsor yang telah terpasang di Kecamatan Lambitu sebagai kawasan rawan longsor. Juga ada alat pendeteksi gempa atau alat pemantau gempa Seismograf. Alat tersebut dipergunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah.

.Demikian dalam upaya melaksanakan riset yang berkelanjutan. Pada dasarnya riset tentang kebencanaan sebagai langkah untuk mengetahui ancaman dan potensi, memperkuat protokol kebencanaan, guna meminimalisir risiko. Melalui publikasi hasil riset secara resmi, masyarakat diharapkan lebih memahami lokasi yang menjadi tempat tinggalnya, apakah berpotensi ancaman bencana tertentu atau tidak.

Dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018-2022, mengupayakan melalui kegiatan riset kebencanaan yang berkelanjutan diharapkan adanya perubahan jangka panjang yang berfokus pada pergeseran paradigma untuk pengurangan risiko bencana yang lebih efektif. Pola pergeseran paradigma dapat menggunakan pengembangan strategi pendidikan dan penyadaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dan maupun sosialilasi informasi lewat media Pemerintah Daerah.

Pergeseran paradigma ini diharapkan membuat trend baru dan bagian dari gaya hidup modern di masyarakat Kabupaten Bima. Sangat penting untuk membangun paradigma penanggulangan bencana ini menjadi sesuatu yang dihargai dan berkembang dengan pola-pola yang mungkin ditiru oleh masyarakat. Upaya dasar yang dapat dilakukan dengan pemberdayaan hasil riset terapan baik dari perguruan tinggi maupun penelitian yang berkaitan penanggulangan bencana. Salah satunya melalui kajian rasio perbandingan investasi (*cost benefit analys*) terhadap setiap fase penanggulangan bencana.

Selain itu dapat dikembangkan juga hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh individu dan keluarga seperti pembangunan rumah aman Gempa, sumur resapan dan lain lain. Diharapkan dengan adanya beberapa riset terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bima dapat menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko multi bahaya.

Demikian kegiatan BPBD yang melakukan Penelitian bersama TIM UGM yang difasilitasi oleh BNPB, juga bersama NGO dan LP2DM kaitan dengan riset dan penyusunan Peta Potensi Bencana dan Dokumen RPB. BPBD juga ktif melakukan sosialisasi dan diseminasi tentang potensi kebencanaan dan simulasi tanggap bencana kebakaran di Kampus dan Sekolah-sekolah yang melibatkan NGO

internasional seperti Islamic Center. Hasil-hasil riset kerjasama tersebut diharapkan sebagai upaya Pencegahan bahaya yang lebih kepada pengurangan tingkat risiko yang akan muncul dengan melakukan pengelolaan pada lokasi sumber bahaya. Selain itu publikasi hasil riset dapat dijadikan panduan untuk pengurangan Kerentanan dengan melakukan mitigasi struktural maupun nonstruktural. Dan ntentunya dapat meningkatkan kapasitas daerah terutama pengetahuan pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan mengetahui jenis ancaman dan dampak kejadian

Berikut adalah tabel program dan kegiatan dalam strategi penelitian dan pendidikan, serta rencana aksinya dalam Penaggulangan Bencana di Kabupaten Bima:

Tabel 7.
Rencana Aksi untuk Penelitian dan Pendidikan

AVCI	INDIVATOR	KETERLIBATAN	SUMBER PENGANGGARAN			
AKSI	INDIKATOR	INSTANSI	MANDIRI	KERJASAMA	VERTIKAL	
Pengintegrasian hasil riset kedalam kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana	Integrasi hasil riset kedalam kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana	Utama : BPBD Pendukung : Perguruan Tinggi, BAPPEDA, DISHUBKOMINFO, BMKG,BPMPKB,PU, Bagian Hukum	30%	50%	20%	
Penerapan hasil riset dalam pemanfaatan bangunan sekolah dan kantor pemerintahan sebagai tempat pengungsian sementara	Diterapkannya hasil riset dalam pemanfaatan bangunan sekolah dan kantor pemerintahan sebagai tempat pengungsian sementara	Utama : BPBD Pendukung : Perguruan Tinggi, BAPPEDA, DISHUBKOMINFO, BMKG,BPMPKB,PU, Bagian Hukum	30%	50%	20%	

Sumber: Dokumen RPB Tahun 2018-2022

PENUTUP

Kesimpulan

Kapabilitas kelembagaan menjadi sebuah tolok ukur kemampuan dan pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam upaya penanggulangan bencana yang akan dan telah dilaksanakan selama ini. Dimana penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya keuangan yang masih minim dimana pagu anggaran dalam penanggulangan bencana daerah belum memenuhi angka 1 persen, padahal menurut Undang-Undang mewajibkan minimal 1 persen dari APBD, sehingga menyebabkan keterpaduan dan koordinasi kelembagaan tidak efektif, demikian upaya kolektif untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana juga tidak maksimal. Selain itu rendahnya Indeks ketahanan

bencana Kabupaten Bima dimana masih berada pada level 3 berdasarkan indikator *Hyogo Frameworks for Actions (HFA)*. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bima telah melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana, namun dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis karena disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis serta lemahnya daya dukung anggaran. Selain itu, data tingkat kesiapsiagaan dan kapasitas Daerah Kabupaten Bima dalam menghadapi berbagai jenis bencana berada pada level rendah dan sangat berisiko.

Walaupun Daya dukung APBD belum memadai, namun dalam item upaya tanggap darurat dan penyediaan teknologi pendukung dalam penanggulangan bencana, BPBD mendapat bantuan dari BNPB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga disediakan dana siap pakai, dan dana dari kerjasama kelembagaan. Selain itu, kerjasama penelitian dan publikasi hasil-hasil riset terapan serta sosialisasinya bagi masyarakat dalam membentuk paradigma pengurangan resiko bencana dimana penggunaan teknologi dan informasi serta media sosial seperti media Fanpage Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube milik Pemerintah Daerah menjadi alternatif sebagai aksi untuk penyebaran informasi yang efektif dan efisien.

SARAN

- 1. Mengingat rendahnya Indeks ketahanan bencana Kabupaten Bima masih berada pada level 3, disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis serta lemahnya daya dukung anggaran dalam penanggulangan bencana. Pun demikian dengan data tingkat kesiapsiagaan Daerah Kabupaten Bima yang berada pada level rendah dan sangat menghawatirkan. Untuk itu perlu political will Kepala Daerah untuk dapat memprioritaskan program manajemen bencana secara terintegrasi dan meningkatkan sosialisasinya secara kelembagaan dan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah harus menginisiasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah yang harus selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bima. Kemudian perlunya pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
- 2. Pemerintah Daerah harus meningkatkan kemampuan ketahanan dan kesiapsiagaan dari indeks/level 3 sampai pada ke level 5 agar tercipta daerah dengan tingkat ketahanan terbaik untuk mengurangi resiko bencana. Perlu

diupayakan tindakan-tindakan dan rencana-rencana yang sistematis yang di dukung sepenuhnya oleh lembaga Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bima dengan komitmen yang kuat dalam pengurangan risiko bencana. Sumber Daya Anggaran yang belum memadai dan tidak representatif, maka diperlukan kesadaran sosial yang lebih tinggi pada pihak legislatif dan eksekutif dalam mengembangkan politik anggaran di APBD Kabupaten Bima sehingga ke depan akan meningkatkan persentase untuk biaya penanggualangan bencana yang notabene tingkat ketahanan bencana yang sangat rawan dan menghawatirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi, D. (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. *REFORMASI*, *5*(1), 13-30.
- Altay, N., & Green III, W. G. (2006). OR/MS research in disaster operations management. *European journal of operational research*, *175*(1), 475-493.
- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *Jurnal Sepa*, 7(2), 102-109.
- Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1998). Ethics, character, and authentic transformational leadership.{Online}. Bulunduğu adres: http://cls. binghamton. edu/BassSteid. html.
- Black, A. James dan J. Champion, Dean, 2009. *Metode & masalah penelitan Sosial. Bandung. Refika Aditama*. Cetakan keempat.
- Cabarcos, *et al.*, (2015). Organizational Capabilities And Profitability: The Mediating Role Of Business Strategy. Spain Portugal. *Sage Journals*. Open October-December 2015: 1-13.
- Djalante, R. (2012). Adaptive Governance And Resilience: The Role Of Multi-Stakeholder Platforms In Disaster Risk Reduction.
- Eaton, J. W. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: Dari Konsep ke Aplikasi*. Penerbit UI-Press. Jakarta.
- Faturahman, B. M. (2017). Reformasi Administrasi Dalam Manajemen Bencana. *Mimbar Yustitia*, 1(2), 185-201.
- Faizah, N., & Buchori, I. (2018). *Model Pemetaan Risiko Kekeringan Di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Handayani, R. (2011). Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana Di Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial "Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif"* edisi kedua. Jakarta. Erlangga.
- Khatri, N. (2005). An alternative model of transformational leadership. *Vision*, *9*(2), 19-26.
- Kurniawan, M. A., Suarbawa, K. N., & Septiadhi, A. 2017. Analisis Risiko Bencana Gempabumi Di Wilayah Nusa Tenggara Barat. *Buletin Fisika*, *18*(1), 38-45.

- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Gava Media. Yogyakarta.
- Lestari, S. A. P., & Widayanti, B. H. (2019). Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Jagung di Kabupaten Dompu Berbasis SIG. *Jurnal Planoearth*, 2(1), 20-23.
 - Paul, Bimal Kanti. 2011. *Environmental Hazards And Disasters: Contexts, Perspectives And Management*. Wiley-Blackwell. Oxford, Uk.
- Meiwanda, G. (2016). Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatandan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 19(3), 251-263.
- O'Brien, G., O'Keefe, P., Rose, J., & Wisner, B. (2006). Climate change and disaster management. *Disasters*, 30(1), 64-80.
- Lestari, P., Prabowo, A., & Wibawa, A. (2014). Manajemen komunikasi bencana merapi 2010 pada saat tanggap darurat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *10*(2).
- Roghe, *et al.*, (2012). Organization of the Future–Designed to Win: Organizational Capabilities Matter. *The Boston Consulting Group*.
- Romjin, Henny., Albaladejo, Manuel (2001), Determinants of Innovation Capability in Small UK Firms: An
- Schreyögg, G., & Kliesch-Eberl, M. (2007). How dynamic can organizational capabilities be? Towards a dual-process model of capability dynamization. Strategic management journal, 28(9), 913-933. Empirycal Analysis, QEH Working Paper Series QEHWPS40, Number 40..
- Sulistyo, H., & Rahmani, E. (2011). *Model Peningkatan Kinerja Melalui Kapabilitas Inovasi Pada UKM di Semarang*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL* & *INTERNASIONAL* (Vol. 1, No. 1).
- Sampurno. (2011). *Manajemen Stratejik, Menciptakan Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sopiawati, N. (2019, June). The Role Of Women In The Management Of Flood Disasters In Bima District, Nusa Tenggara Barat. In *lop Conference Series:* Earth And Environmental Science (Vol. 271, No. 1, P. 012030). lop Publishing.
- Sosiawan, E.A. (2014). Model ideal manajemen tekonologi informasi dan komunikasi dalam mendukung operasional penanganan bencana alam. Jurnal ilmu Pengetahuan dan teknologi Komunikasi, 17(2), 175-188
- Suri, N. K. (2016). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo dalam upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. *PERSPEKTIF*, *5*(1).
- Ulum, M. C. (2014). *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Wijayanti, I., Pneumatica, O., & Nurjannah, S. (2018). Perempuan Bima dan Strategi Adaptasi Pasca Bencana Banjir Bandang (Studi Kasus Peran Perempuan di Kabupaten Bima, NTB). Simulacra: Jurnal Sosiologi, 1(1), 5-18.
- Williams, M. (2005). Leadership for leaders (pp. 9-25). London: Thorogood.
- Yanuarto, E., & Kumorohadi, U. (2013). Peran Kapabilitas Inovasi Terhadap Perbaikan Produk Usaha Kecil Menengah (UKM) Dengan Tekanan Lingkungan dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UKM di Kabupaten Purbalingga). In *Performance* (Vol. 16, No. 2).

- Yukl, G. (1998), Leadership in Organizations, Fourth Edition. New Jersey: Prentice
- Yuniartanti, R. K. (2018). Rekomendasi adaptasi dan mitigasi bencana banjir di Kawasan Rawan Bencana (KRB) banjir Kota Bima. Journal of Regional and Rural Development Planning, 2(2), 118-13
- -----Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 20018 diakses pada tanggal 22 November 2019
- ------Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penaggulangan bencana pada tanggal 22 November 2019
- https://regional.kompas.com/*read/2019/04/03/21095861/hujan-deras-banjir-bandang-terjang-4-kelurahan-di-dompu?page=all*, di akses pada tanggal 17 Agustus 2019
- https://regional.kompas.com/read/2019/01/12/17101791/ratusan-rumah-di-dompu-ntbterdampak-banjir-bandang di akses 17 Agustus 2019
- https://www.republika.co.id/*berita/pu5j5r409/nasional/daerah/19/07/04/pu4awg382-kekeringan-di-ntb-meluas* diakses 17 Agustus 2019
- https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/14/plbrg2382-banjir-terjangdua-desa-di-kabupaten-bima 17 Agustus 2019
- https://www.kompas.tv/article/19270/banjir-parah-landa-kabupaten-bima diakses pada tanggal 17 Agustus 2019
- Dokumen RPB BPBD Kabupaten Bima Tahun 2018-2022
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penaggulangan Bencana 22 November 2019
- Perda Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penaggulangan Bencana Daerah 22 November 2019